

PERKEMBANGAN DEMOKRASI: STUDI KOMPERASI PERTARUNGAN PARTAI ISLAM PADA PEMILU 2024

Novita Dwi Indriani¹

¹Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
e-mail: ¹novitadwiindriani20@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juisspol.v5i2.4772>

Received: 4 Agustus 2025

Revised: 10 Oktober 2025

Accepted: 30 Oktober 2025

Abstrak

Pemilu 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan politik Indonesia, khususnya bagi partai politik Islam. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, partai-partai Islam menghadapi tantangan besar dalam meraih dukungan elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis studi komparasi pertarungan partai politik Islam di Pemilu 2024, dengan fokus pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder, serta menganalisis strategi kampanye, konsolidasi internal, dan respons terhadap perubahan sosial politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB dan PKS berhasil mempertahankan dan meningkatkan elektabilitasnya berkat strategi kampanye yang inklusif, adaptasi terhadap isu-isu sosial-ekonomi, dan pemanfaatan teknologi komunikasi. Sebaliknya, PPP mengalami kegagalan dalam menembus ambang batas parlemen, yang disebabkan oleh krisis institusional dan kurangnya inovasi dalam merespons tuntutan pemilih yang semakin pragmatis. Secara keseluruhan, keberhasilan atau kegagalan partai politik Islam dalam Pemilu 2024 sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan menjaga relevansi di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.

Kata kunci: pertarungan, Partai_Politik_Islam, Pemilu_2024.

Abstract

The 2024 general election marks a significant point in Indonesia's political journey, particularly for Islamic political parties. Although Indonesia is a Muslim-majority country, Islamic parties face significant challenges in gaining electoral support. This research aims to analyze a comparative study of the struggle of Islamic political parties in the 2024 elections, focusing on the National Awakening Party (PKB), Prosperous Justice Party (PKS), and United Development Party (PPP). This research uses a descriptive qualitative approach, gathering data from primary and secondary sources, and analyzing campaign strategies, internal consolidation, and responses to socio-political changes. The findings show that PKB and PKS successfully maintained and increased their electability thanks to inclusive campaign strategies, adaptation to socio-economic issues, and the use of communication technology. In contrast, PPP failed to meet the parliamentary threshold, due to institutional crises and a lack of innovation in responding to the demands of an increasingly pragmatic electorate. Overall, the success or failure of Islamic political parties in the 2024 elections is greatly influenced by their ability to adjust to the times and maintain relevance amidst the plurality of Indonesian society.

Key words: fighting, Islamic_Political_Parties, 2024_general_election.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan tonggak utama dalam sistem demokrasi di Indonesia yang tidak hanya menjadi ajang peralihan kekuasaan secara damai, tetapi juga menjadi barometer keberhasilan representasi politik masyarakat melalui partai politik. Dalam konteks negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan partai politik Islam menjadi salah satu warna penting dalam dinamika demokrasi Indonesia. Meski telah melewati berbagai era politik mulai dari orde lama, orde baru hingga era reformasi partai politik Islam tetap menunjukkan keberadaannya, meski dalam perjalanan panjangnya mereka mengalami dinamika, tantangan, bahkan kemunduran kekuasaan di berbagai momentum pemilu.

Partai politik Islam hadir sebagai manifestasi dari aspirasi sebagian masyarakat Muslim yang menginginkan nilai-nilai keislaman mewarnai kebijakan publik dan proses politik nasional. Sejak masa kerajaan Islam di Nusantara hingga era kemerdekaan, kekuatan politik Islam mengalami fluktuasi tajam, terutama akibat dominasi kolonialisme dan sistem sekularisme modern yang meminggirkan peran agama dalam ranah politik formal. Namun, pasca Reformasi 1998, kebebasan berpolitik membuka ruang baru bagi partai-partai Islam untuk kembali masuk ke dalam arus utama demokrasi nasional. (Anwar, 2023)

Reformasi politik telah memunculkan berbagai partai berbasis Islam, baik yang mengedepankan pendekatan konservatif maupun yang moderat dan inklusif. Di antara partai-partai tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi representasi penting dari

keberadaan politik Islam Indonesia. PKB, sebagai partai berbasis Nahdlatul Ulama, dikenal dengan pendekatan Islam moderat dan nasionalis religius. PKS tampil sebagai partai dakwah yang konsisten dengan agenda-agenda keumatan, sedangkan PPP merupakan partai Islam tertua pasca Orde Baru yang memiliki akar sejarah panjang. (Muhaimin et al., 2024)

Namun, perjalanan partai-partai Islam tidaklah selalu mulus. Dalam Pemilu 2024, terjadi fenomena mencolok berupa kegagalan PPP melampaui ambang batas parlemen, sebuah presiden sejarah baru dalam politik Islam Indonesia. Sebaliknya, PKB dan PKS tidak hanya berhasil bertahan, namun juga mengalami peningkatan elektoral yang signifikan. Keberhasilan dua partai tersebut tidak terlepas dari kebiasaan mereka dalam mengelola kelembagaan partai secara adaptif dan fungsional, sedangkan kegagalan PPP disebabkan lemahnya pelembagaan internal yang membuat partai gagal merespons dinamika demokrasi yang terus berubah. (Muhaimin et al., 2024)

Lebih lanjut, partai politik Islam yang cenderung moderat dan terbuka terhadap sistem demokrasi memiliki peluang lebih besar dalam meraih suara pemilih. Sementara partai dengan pendekatan konservatif dan eksklusif mengalami kesulitan dalam menjangkau basis pemilih yang lebih luas, terutama dari kalangan generasi muda. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan partai politik Islam bukan semata-mata ditentukan oleh basis ideologis, namun lebih pada kebiasaan partai dalam melakukan adaptasi strategi dan komunikasi politik di era post-Islamisme. (Nasuhaidi & Subekti, 2024)

Konsep post-Islamisme sendiri menandai pergeseran paradigma partai Islam dari pendekatan formalistik ke pendekatan substantif, yakni mendorong nilai-nilai keislaman melalui proses demokrasi yang inklusif. Post-Islamisme menjadi alternatif masa depan bagi politik

Islam di Indonesia karena bisa menjembatani antara aspirasi keagamaan dan realitas demokrasi modern. Dalam konteks ini, keberhasilan PKB dan PKS dalam Pemilu 2024 juga tidak terlepas dari kebisaannya mengelola isu-isu aktual seperti ekonomi syariah, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat tanpa harus mendorong formalisasi syariah secara ketat. (Qodir, 2023)

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi partai politik Islam tidak hanya berasal dari kelemahan internal kelembagaan, seperti kurangnya kaderisasi dan konflik elit, tetapi juga dari dinamika politik nasional yang semakin pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan. Menjelang Pemilu 2024, berbagai studi dan pengamatan politik menunjukkan munculnya gejala regresi demokrasi yaitu situasi di mana prinsip-prinsip demokrasi mengalami kemunduran, ditandai dengan semakin dominannya kekuasaan eksekutif, melemahnya institusi pengawasan, serta menyempitnya ruang kebebasan sipil dan politik. Dalam iklim politik yang demikian, suara-suara kritis dari masyarakat sipil dan kelompok keagamaan menjadi kurang terdengar, bahkan sering kali dibungkam atau diabaikan.

Partai politik Islam, yang semestinya menjadi kanal artikulasi aspirasi umat, justru kerap terjebak dalam kalkulasi politik jangka pendek. Alih-alih memperjuangkan agenda substansial yang menyentuh kepentingan masyarakat, banyak dari mereka larut dalam pusaran koalisi kekuasaan yang lebih berorientasi pada negosiasi jabatan, pembagian kekuasaan, serta agenda elite semata. Hal ini menyebabkan krisis kepercayaan dari sebagian konstituen Muslim terhadap partai Islam, terutama ketika partai-partai tersebut gagal menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi isu-isu publik seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran hak-hak demokratis. Kecenderungan ini menciptakan paradoks tersendiri: partai

yang berlandaskan nilai keagamaan justru kehilangan legitimasi moralnya karena dianggap terlalu pragmatis dan tidak lagi mencerminkan nilai-nilai perjuangan umat.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kolaborasi antar partai Islam itu sendiri. Alih-alih bersatu dalam satu poros kekuatan umat sebagaimana pernah diwacanakan dalam konteks “Koalisi Poros Islam,” mereka justru terpecah dalam berbagai aliansi politik pragmatis yang melemahkan daya tawar ideologis mereka di tingkat nasional. Dalam konteks inilah, tantangan terbesar partai politik Islam bukan hanya bagaimana mereka bisa memenangkan suara dalam pemilu, tetapi juga bagaimana mempertahankan jati diri, integritas ideologis, dan peran advokatif terhadap kepentingan umat di tengah pusaran politik yang semakin transaksional dan elitis. (Triana, 2024)

Selain itu, kekuatan partai politik Islam juga dipengaruhi oleh efektivitas strategi kampanye yang mereka lakukan. Kombinasi antara pendekatan kultural dan modern dalam kampanye politik, khususnya di daerah-daerah yang memiliki basis massa Muslim konservatif. Studi mereka menunjukkan bahwa PKB bisa meraih peningkatan kursi karena sukses memadukan nilai tradisional Islam dengan strategi politik elektoral yang pragmatis dan berbasis lokal. (Hawari & Agustamsyah, 2024)

Peran partai Islam dalam bidang ekonomi juga turut memengaruhi citra dan elektabilitas mereka. Partai seperti PKS berhasil membangun image sebagai pengusung ekonomi syariah yang progresif, melalui dukungan terhadap lembaga keuangan syariah, produk halal, serta program pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini menambah nilai tambah partai dalam pandangan pemilih Muslim yang semakin rasional dan kritis terhadap isu-isu keumatan. (Sholehah et al., 2024)

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, maka studi ini berupaya

untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam perihal studi komparasi pertarungan partai politik Islam dalam perhelatan Pemilu 2024. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap diskursus politik Islam kontemporer di Indonesia serta untuk membaca arah masa depan partai-partai Islam di tengah tantangan demokrasi elektoral yang semakin kompleks.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika pertarungan partai politik Islam dalam Pemilu 2024 sebagai wujud perkembangan dari demokrasi. Pendekatan ini dipilih karena bisa menggapai kompleksitas realitas politik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata, melainkan memerlukan interpretasi atas konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang menyertainya. Penelitian ini merupakan studi deskriptif-analitis dengan fokus pada tiga partai Islam utama, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terdapat alasan peneliti memfokuskan terhadap ketiga partai tersebut karena mampu merepresentasikan perbedaan tiga model ideologi Islam politik, seperti PPP lebih berorientasi ke Islam formalistik sekaligus telah ada saat orde baru. Kemudian, PKS mempunyai ciri khas sebagai Islam modernis-revivalis yang berakar pada gerakan tarbiyah. Sementara, PKB mampu mewakili Islam tradisional dengan mempunyai basis Nahdlatul Ulama. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa hasil resmi Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta dokumentasi kampanye politik, dan data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah, artikel jurnal, laporan media kredibel, serta publikasi resmi partai.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai jurnal ilmiah, dokumentasi digital dari KPU, serta analisis wacana atas narasi politik dan strategi kampanye partai Islam. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait faktor keberhasilan atau kegagalan partai Islam dalam kontestasi elektoral, termasuk strategi komunikasi, kekuatan ideologi, basis massa, serta pendekatan moderat atau konservatif. Penelitian ini juga memanfaatkan kerangka teori institusionalisme untuk menjelaskan pelembagaan partai, serta pendekatan post-Islamisme guna menelaah transformasi nilai-nilai politik Islam dalam konteks demokrasi modern. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari berbagai jurnal dan dokumen partai serta hasil resmi pemilu, dan *cross-check* tematik untuk menjamin koherensi antara interpretasi dan konteks empiris. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada partai-partai Islam yang secara signifikan terlibat dalam kontestasi Pemilu 2024, sehingga tidak membahas partai-partai kecil atau yang tidak memiliki pengaruh elektoral nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konfigurasi Partai Politik Islam dalam Pemilu 2024

Pemilu 2024 menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan politik Indonesia pasca-reformasi, khususnya bagi keberadaan partai-partai politik Islam. Sejak masa Orde Baru hingga era demokrasi multipartai, partai Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari peta politik nasional. Namun demikian, konfigurasi kekuatan politik Islam dalam Pemilu 2024 menunjukkan dinamika yang

kompleks dan berbeda dibanding pemilu sebelumnya. Terdapat lima partai politik Islam yang terdaftar sebagai peserta dalam kontestasi legislatif nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Ummat. Dari kelima partai tersebut, hanya dua partai yang berhasil menembus ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4%, yaitu PKB dan PKS. (Muhaimin et al., 2024)

Kejutan terbesar dalam Pemilu 2024 adalah kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebuah partai Islam tertua di Indonesia pasca-Orde Baru dalam memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia karena tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen yang ditetapkan sebesar 4%. Kegagalan PPP ini mencerminkan adanya perubahan signifikan dalam konstelasi kekuatan politik Islam di Indonesia, yang sebelumnya diperkirakan akan tetap menjadi kekuatan dominan, setidaknya dalam segmen partai Islam. PPP, yang memiliki sejarah panjang sejak era Orde Baru, gagal menunjukkan kapasitas untuk beradaptasi dengan dinamika politik yang berubah. Penyebab kegagalan ini dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti lemahnya struktur kelembagaan partai, kurangnya figur pemimpin yang bisa menarik perhatian pemilih muda, serta ketidakbisaan dalam merumuskan narasi politik yang relevan dengan perkembangan zaman. PPP juga kerap dilihat sebagai partai yang terjebak dalam pola konservatif dan tidak bisa bertransformasi seiring dengan kebutuhan modernisasi politik Indonesia yang lebih pragmatis. (Muhaimin et al., 2024)

Sementara itu, di sisi lain, dua partai politik Islam lainnya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), justru menunjukkan penguatan elektoral yang

signifikan. PKB, yang selama ini dikenal sebagai representasi dari Nahdlatul Ulama (NU), mencatatkan kenaikan suara yang mencolok, bahkan berada dalam posisi lima besar nasional. Keberhasilan PKB dalam meraih posisi tersebut mencerminkan daya tariknya yang semakin meluas, terutama di kalangan pemilih muda dan urban, kelompok yang sebelumnya kurang terjangkau oleh partai berbasis keagamaan. PKB berhasil mempertahankan basis massa tradisionalnya yang solid di kalangan masyarakat Nahdliyin, namun juga memperluas jangkauan pemilih dengan mengusung isu-isu progresif seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yang resonansinya lebih luas dan dapat diterima oleh kalangan pemilih yang lebih heterogen. (Aprimayanti, 2025)

Sementara itu, PKS juga mengalami peningkatan suara yang signifikan meskipun dalam konteks politik Indonesia yang semakin terbuka dan plural. Keberhasilan PKS tercermin dalam keberhasilan mereka mempertahankan dan memperkuat citra sebagai partai yang memiliki prinsip ideologis yang jelas, sekaligus bisa beradaptasi dengan tuntutan zaman melalui penguatan program sosial-ekonomi berbasis syariah. PKS, meskipun lebih dikenal sebagai partai dakwah yang cukup konservatif dalam hal nilai-nilai ideologis, berhasil menjembatani gap antara kepentingan agama dan kepentingan kesejahteraan sosial-ekonomi, yang menjadikannya relevan bagi kalangan pemilih yang lebih luas. (Sholehah et al., 2024)

Kedua partai ini, PKB dan PKS, membuktikan bahwa kesuksesan dalam Pemilu 2024 tidak lagi semata-mata ditentukan oleh simbolisme agama atau kesetiaan ideologis yang kaku terhadap basis pemilih tradisional. Sebaliknya, keberhasilan mereka justru lahir dari kebisaan untuk membaca dinamika sosial-politik yang berkembang di tengah

masyarakat serta merumuskan strategi yang adaptif dan solutif. Dalam konteks demokrasi elektoral yang semakin kompetitif, keduanya bisa mengombinasikan nilai-nilai keislaman dengan isu-isu aktual seperti keadilan sosial, akses pendidikan, ekonomi syariah, dan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi perhatian utama kelompok pemilih muda dan kelas menengah urban.

Keberhasilan PKB dan PKS dalam mempertahankan basis konstituennya sembari memperluas cakupan elektoral di luar basis tradisional menjadi bukti bahwa partai politik Islam yang bisa mengartikulasikan pesan-pesan politik yang relevan, memiliki struktur kelembagaan yang solid, serta fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman memiliki peluang besar untuk memperoleh keberhasilan elektoral yang berkelanjutan. Kebiasaan mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi, membangun komunikasi politik dua arah, serta menjaga citra partai yang bersih dan terorganisir turut memperkuat posisi keduanya di tengah tren menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik secara umum. Dengan kata lain, keberhasilan PKB dan PKS menjadi cerminan penting bahwa modernisasi strategi dan profesionalisme kelembagaan adalah kunci utama untuk mempertahankan keberadaan partai Islam dalam lanskap politik Indonesia yang semakin rasional dan pluralistik. (Nasuhaidi & Subekti, 2024)

Konfigurasi ini menunjukkan adanya diferensiasi strategi dan kelembagaan di antara partai-partai Islam. PKB dan PKS tampil sebagai partai yang lebih bisa beradaptasi terhadap dinamika politik kontemporer dengan menawarkan pendekatan Islam yang moderat, inklusif, serta berbasis isu-isu keseharian seperti ekonomi keumatan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial. Sebaliknya, partai-partai Islam lain seperti PBB dan Partai Ummat mengalami kesulitan dalam

menembus ceruk elektoral akibat pendekatan politik yang terlalu simbolik dan kurang bisa menawarkan narasi politik yang relevan bagi generasi pemilih muda yang pragmatis dan rasional. (Nasuhaidi & Subekti, 2024)

Dari sisi historis, keberadaan partai Islam dalam sistem politik Indonesia pasca-reformasi mengalami pergeseran posisi yang signifikan. Pada masa awal Reformasi, khususnya Pemilu 1999, partai-partai Islam seperti PKB, PPP, PBB, dan PAN berhasil memperoleh porsi representasi yang relatif kuat dalam parlemen, bahkan sempat mendominasi wacana politik nasional. Saat itu, antusiasme umat Islam terhadap demokrasi baru yang terbuka memberikan ruang ekspresi bagi partai-partai berbasis ideologi Islam untuk meneguhkan posisi politiknya. Namun, tren selanjutnya menunjukkan penurunan yang gradual dan konsisten. Dalam Pemilu 2004 dan 2009, meskipun partai-partai Islam masih bertahan, kekuatan elektoralnya mulai melemah, dan memasuki Pemilu 2014 hingga 2024, hanya segelintir partai Islam yang bisa mempertahankan keberadaannya di tingkat nasional.

Partai Islam yang bersifat moderat, inklusif, dan akomodatif terhadap nilai-nilai demokrasi cenderung memiliki daya tahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan partai yang rigid dan konservatif. Moderasi politik terbukti menjadi faktor penting dalam menjaga relevansi partai di tengah masyarakat yang semakin plural dan pragmatis. Hal ini tercermin pada konsistensi PKB dan PKS dalam mempertahankan kursi parlemen sejak Pemilu 2004 hingga kini. PKB yang mengusung Islam Nusantara dan menjalin kedekatan dengan kalangan pesantren berhasil menarik suara dari pemilih tradisional dan muda. Sementara itu, PKS meskipun berakar pada ideologi dakwah, bisa mengelola citra sebagai partai Islam yang bersih, responsif terhadap isu sosial,

dan adaptif terhadap perubahan media komunikasi politik.

Sebaliknya, partai-partai seperti PPP yang cenderung mempertahankan pendekatan ideologis yang eksklusif dan kurang responsif terhadap dinamika pemilih, mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan realitas politik yang terus berkembang. Kegagalan partai-partai ini dalam menembus ambang batas parlemen menegaskan bahwa pemilih Indonesia tidak lagi terjebak dalam politik identitas semata, melainkan lebih mempertimbangkan kapasitas, program, dan kredibilitas partai dalam menghadapi persoalan nyata bangsa. Dengan demikian, pergeseran posisi partai Islam dalam politik nasional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ideologi, tetapi juga oleh sejauh mana partai bisa membaca konteks zaman dan bertransformasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat demokratis modern. (Nasuhaidi & Subekti, 2024)

Realitas demografis Indonesia yang mayoritas Muslim tidak serta-merta menjamin kemenangan partai berbasis Islam. Ini menjadi paradoks dalam demokrasi Indonesia: meskipun secara statistik umat Islam mendominasi populasi, namun pemilih cenderung memilih partai yang tidak semata-mata mengusung identitas keagamaan, melainkan juga kapabilitas kelembagaan dan kedekatan dengan isu-isu publik. Perkembangan partai Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebiasaan untuk menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi, bukan semata mengedepankan agenda syariat secara normatif. (Anwar, 2023) Partai-partai Islam di Indonesia yang gagal mempertahankan keberadaan mereka sering kali terjebak dalam pola kepemimpinan yang tidak jelas dan konflik internal yang terus menerus mengganggu kelancaran organisasi. (Santoso et al., 2020)

Secara umum, konfigurasi partai politik Islam dalam Pemilu 2024 mencerminkan transformasi dari pendekatan simbolik dan ideologis menuju pendekatan pragmatis dan substantif. Partai-partai yang bisa mengartikulasikan nilai-nilai Islam dalam bingkai kebangsaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial memiliki peluang lebih besar untuk diterima masyarakat luas. Dengan demikian, Pemilu 2024 memperlihatkan seleksi alam politik Islam yang menuntut adanya reformulasi strategi partai untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah lanskap demokrasi yang semakin rasional, digital, dan berbasis kinerja.

3.2. Kekuatan dan Strategi Elektoral PKB dan PKS

Pemilu 2024 memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan dan keberhasilan strategi elektoral yang diterapkan oleh dua partai politik Islam utama di Indonesia, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai ini tidak hanya berhasil mempertahankan posisinya di parlemen, tetapi juga menunjukkan peningkatan elektoral yang signifikan, terutama di kalangan pemilih muda dan urban. PKB dan PKS menunjukkan ketangguhan dalam strategi elektoral mereka, terutama di tengah ketidakpastian politik dan peningkatan polarisasi di Indonesia. PKB, dengan dukungan dari basis NU, bisa mengadaptasi nilai-nilai Islam moderat dengan isu-isu sosial-ekonomi yang lebih relevan bagi masyarakat luas. PKB lebih berfokus pada penguatan hubungan sosial dan pendidikan untuk meraih pemilih muda, sementara PKS mempertahankan konsistensi ideologisnya dengan menonjolkan nilai-nilai Islam yang lebih konservatif.

Keberhasilan PKS dalam mempertahankan suara juga dipengaruhi oleh konsolidasi internal yang kuat serta penggunaan strategi kampanye berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial yang resonan dengan pemilih Muslim moderat. (Iman, 2023)

Kedua partai ini, meskipun berbeda dalam pendekatan ideologis, menunjukkan bahwa keberhasilan dalam Pemilu 2024 banyak bergantung pada kebiasaan mereka untuk menyesuaikan pesan dan platform mereka dengan kebutuhan pemilih yang lebih beragam dan dinamis. (Wahidin et al., 2025) Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa meskipun partai Islam di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menarik pemilih, strategi yang tepat dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan politik dapat memengaruhi hasil elektoral secara signifikan.

PKB, yang merupakan partai yang memiliki akar kuat dalam organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), berhasil mempertahankan basis massa tradisionalnya yang solid, khususnya di daerah-daerah pedesaan dan kantong-kantong kultural NU seperti Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan loyalitas historis pemilih terhadap simbol-simbol keagamaan, tetapi juga menunjukkan efektivitas strategi kultural yang dijalankan PKB dalam menjaga kedekatan dengan komunitas pesantren, kiai, serta struktur keulamaan lokal. Di saat yang bersamaan, PKB bisa memperluas daya tarik elektoralnya ke kalangan pemilih muda dan masyarakat urban yang lebih rasional dan terbuka terhadap isu-isu kontemporer. Ini menjadi salah satu pencapaian penting karena segmen pemilih muda mendominasi dalam Pemilu 2024 dan cenderung tidak

memilih berdasarkan loyalitas ideologis semata, melainkan berdasarkan relevansi program dan figur publik.

Salah satu faktor kunci dari keberhasilan PKB tersebut terletak pada kebiasaannya menjaga keseimbangan antara ideologi Islam tradisional dengan isu-isu publik yang progresif. PKB secara strategis memanfaatkan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung oleh NU, seperti toleransi, kebangsaan, dan kearifan lokal (*local wisdom*), namun secara bersamaan juga menekankan pentingnya isu-isu sosial-ekonomi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Program-program yang diusung PKB menyoroti pengembangan pendidikan berbasis pesantren dan madrasah, pemberdayaan ekonomi umat melalui UMKM dan koperasi syariah, serta upaya konkret dalam pengentasan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. Pendekatan ini berhasil menciptakan kesan bahwa PKB tidak hanya partai keagamaan, tetapi juga partai kerakyatan yang peka terhadap dinamika zaman. Dengan demikian, PKB bisa menampilkan citra sebagai partai Islam yang moderat, inklusif, dan solutif, yang menjadi nilai tambah dalam menarik simpati publik lintas segmen, baik dari kalangan santri maupun profesional muda di perkotaan. (Aprimayanti, 2025)

Strategi kampanye PKB terbukti sangat efektif dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial melalui pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam moderat dan kultural. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi ideologis partai, tetapi juga meningkatkan daya tarik elektoral di tengah masyarakat yang semakin plural dan pragmatis. PKB bisa

menyeimbangkan antara warisan tradisional Nahdlatul Ulama (NU) yang kuat di akar rumput dengan narasi-narasi politik kontemporer yang relevan bagi masyarakat urban. Salah satu kunci keberhasilan ini adalah kemitraan erat PKB dengan tokoh-tokoh NU, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang memiliki legitimasi moral dan sosial yang tinggi di kalangan pemilih Muslim tradisional. Tokoh-tokoh ini tidak hanya menjadi pendukung simbolik, tetapi juga berperan aktif dalam menyebarkan pesan politik PKB melalui forum keagamaan, pengajian, dan jaringan pesantren.

Lebih dari itu, PKB secara konsisten mengusung platform politik yang lebih progresif dan inklusif, mencakup isu-isu seperti pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan transformasi ekonomi berbasis kerakyatan. Kampanye partai ini juga menunjukkan keterbukaan terhadap media digital dan pemanfaatan media sosial untuk menjangkau pemilih muda, yang kini menjadi kelompok dominan dalam demografi pemilu. Narasi kampanye yang menekankan pentingnya keadilan sosial, pendidikan berkualitas, dan pemerataan ekonomi berhasil membangun resonansi kuat di kalangan kelas menengah perkotaan yang cenderung rasional dan berbasis isu. Strategi adaptif ini pada akhirnya membuahkan hasil nyata, dengan PKB berhasil meraih peningkatan suara signifikan dan menempati posisi lima besar dalam perolehan suara nasional pada Pemilu 2024, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktor utama dalam lanskap politik nasional yang semakin kompetitif. (Nasuhaiddi & Subekti, 2024)

Selain itu, PKB juga memanfaatkan teknologi digital dan media sosial secara strategis sebagai sarana untuk menjangkau segmen pemilih muda yang semakin kritis, rasional, dan selektif dalam menentukan pilihan politik. Generasi muda masa kini cenderung tidak lagi memilih berdasarkan loyalitas ideologis atau afiliasi keagamaan semata, melainkan lebih mempertimbangkan relevansi isu, substansi program, dan kejelasan visi-misi partai terhadap realitas kehidupan mereka. Dalam konteks ini, PKB secara efektif menggunakan berbagai platform digital seperti Instagram, Twitter (X), YouTube, hingga TikTok untuk menyampaikan pesan politik yang mudah diakses, komunikatif, dan sesuai dengan gaya komunikasi generasi milenial dan Gen Z. Aktivitas kampanye mereka dirancang dengan pendekatan naratif yang menyentuh keseharian masyarakat, seperti isu pendidikan, ekonomi kreatif, kewirausahaan, hingga pemberdayaan perempuan dan pemuda desa. Bahkan, tidak jarang PKB melibatkan influencer muda, tokoh agama muda, dan konten visual yang dinamis untuk memperkuat daya tarik kampanye mereka di ruang digital.

Kebiasaan ini menunjukkan bahwa PKB tidak hanya mempertahankan pendekatan kultural tradisional berbasis Nahdliyin, tetapi juga bisa melakukan inovasi kampanye berbasis teknologi yang relevan dengan era digital. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan elektoral PKB dalam Pemilu 2024 bukan sekadar hasil dari basis historis yang kuat, melainkan juga karena kecakapannya dalam memahami pola pikir dan preferensi komunikasi pemilih muda. Oleh karena itu, keberhasilan PKB juga dapat dipahami

sebagai bentuk sintesis antara kearifan lokal dan modernitas digital dalam strategi elektoralnya, yang pada akhirnya memberikan keunggulan kompetitif dalam perebutan suara di tengah persaingan politik yang semakin dinamis dan pluralistik. (Muhaimin et al., 2024)

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam Pemilu 2024 dengan mempertahankan citra sebagai partai dakwah yang konsisten pada nilai-nilai Islam konservatif, sembari menunjukkan kebisaan adaptif terhadap dinamika sosial-politik kontemporer. Dikenal dengan platform ideologis yang tegas dan orientasi nilai-nilai syariah, PKS berhasil mengonsolidasikan dukungan dari kalangan umat Islam yang menginginkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan. Konsistensi PKS dalam menjaga prinsip keislaman menjadikannya sebagai representasi politik yang dipercaya oleh pemilih loyalis, khususnya dari kelompok Islam urban konservatif dan jaringan dakwah kampus.

Lebih jauh, keberhasilan PKS tidak hanya terletak pada kekuatan ideologisnya, tetapi juga pada inovasi strategi politik yang dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, PKS aktif membangun citra sebagai partai yang responsif terhadap isu-isu publik yang bersifat inklusif seperti pendidikan, ketahanan keluarga, ekonomi keumatan, dan pemberantasan korupsi. Partai ini juga mulai melakukan pendekatan yang lebih pragmatis untuk merangkul kalangan pemilih muda dan kelas menengah yang memiliki aspirasi terhadap keadilan sosial, distribusi ekonomi yang merata, serta

pemerintahan yang bersih dan efisien. Kampanye yang dilakukan PKS tidak hanya menyentuh ranah simbolik, melainkan juga disertai program-program konkrit seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan sosial berbasis komunitas, serta pemanfaatan platform digital dalam menjangkau publik secara lebih luas. Dengan demikian, PKS bisa menjaga relevansinya di tengah lanskap politik yang semakin pragmatis dan kompetitif, serta memperluas segmentasi dukungan tanpa kehilangan identitas keislaman yang menjadi ciri khasnya. (Hawari & Agustamsyah, 2024)

Keberhasilan PKS juga terletak pada kebisaannya dalam mengelola jaringan sosial dan mobilisasi masa yang kuat. Partai ini sangat efektif dalam memanfaatkan organisasi massa yang ada, seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF), untuk meningkatkan mobilisasi pemilih dan menggerakkan massa. PKS juga memanfaatkan saluran komunikasi yang berbasis pada dakwah dan pendidikan politik untuk memperkuat basis pemilihnya, baik melalui pertemuan-pertemuan agama maupun aktivitas sosial lainnya yang menekankan kesejahteraan umat. (Nasuhaidi & Subekti, 2024)

Selain itu, PKS juga bisa memanfaatkan saluran komunikasi modern untuk memperkuat narasi politik mereka, seperti penggunaan media sosial yang dikemas dalam konten dakwah digital, video motivasi Islami, hingga kampanye berbasis isu-isu sosial seperti keadilan, anti-korupsi, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan menggabungkan pendekatan dakwah tradisional dan modern, PKS berhasil memperluas jangkauan politiknya ke segmen masyarakat urban dan generasi

muda yang religius namun melek teknologi. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat loyalitas basis pemilih lama, tetapi juga membuka peluang bagi perekrutan pemilih baru yang mencari alternatif politik yang bersih, religius, namun tetap rasional dan profesional dalam kerja-kerja politik

Namun, PKS juga tidak sepenuhnya terlepas dari tantangan. Meskipun mereka berhasil mendapatkan suara yang signifikan dalam Pemilu 2024, strategi mereka yang berbasis pada prinsip ideologis yang lebih ketat kadang sulit diterima oleh segmen pemilih yang lebih pragmatis dan kurang ideologis. Dalam hal ini, PKS harus terus berinovasi agar tetap relevan di kalangan pemilih muda yang lebih mencari solusi praktis bagi isu-isu sosial-ekonomi yang mereka hadapi, terutama di tengah era digital yang sangat dipengaruhi oleh informasi dan opini yang cepat tersebar. (Qodir, 2023)

Secara keseluruhan, baik PKB maupun PKS menunjukkan bahwa kesuksesan elektoral dalam Pemilu 2024 sangat bergantung pada konsolidasi internal partai, kebiasaan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, serta keberhasilan dalam mengartikulasikan nilai-nilai ideologi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan PKB dalam memperluas basis pemilihnya, khususnya di kalangan pemilih muda, dan PKS yang terus mempertahankan citra partainya sambil beradaptasi dengan isu-isu sosial yang lebih kontemporer, menunjukkan bahwa partai politik Islam yang bisa melakukan kombinasi antara ideologi yang jelas dengan kebiasaan adaptasi terhadap perubahan sosial akan memiliki daya saing yang lebih besar dalam perhelatan pemilu.

3.3. Faktor Kegagalan PPP: Krisis Institusional dan Fragmentasi Politik Islam

Kegagalan PPP dalam Pemilu 2024 menggarisbawahi perubahan besar dalam konfigurasi kekuatan politik Islam di Indonesia, meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Islam menjadi basis terbesar pemilih, partai-partai Islam tidak dapat lagi mengandalkan identitas agama semata untuk menarik dukungan. Penurunan dukungan terhadap PPP dapat dikaitkan dengan krisis institusional dan kelemahan internal partai, sebagaimana ditemukan dalam (Fernando et al., 2023) yang mengungkapkan bahwa partai politik Islam, meskipun berperan penting dalam politik Indonesia, cenderung memiliki tingkat partisipasi dan elektabilitas yang rendah, terutama dalam konteks Pemilu 2009, 2014, dan 2019.

Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa partai Islam di Indonesia semakin mengalami "*de-existence*" atau hilangnya relevansi, terutama karena mereka tidak berhasil menyesuaikan diri dengan dinamika politik modern yang lebih pragmatis. (Hamdanny & Mukhtar, 2021) Sebaliknya, PKB dan PKS, dengan strategi yang lebih inklusif dan moderat, bisa menarik pemilih muda dan memperluas basisnya di kalangan pemilih urban, yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan elektoral mereka. (Syam et al., 2023)

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan PPP dalam Pemilu 2024 adalah krisis institusional yang dialami partai tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Partai yang tidak dapat

melakukan pembaruan dan konsolidasi internal akan kesulitan bersaing di era demokrasi yang semakin dinamis. PPP, meskipun memiliki basis dukungan tradisional yang kuat, terutama di kalangan pemilih Muslim konservatif, gagal memperbaharui struktural dan organisasi partai yang lebih responsif terhadap perubahan zaman. Kepemimpinan partai yang terfragmentasi dan kurangnya figur karismatik yang bisa mempersatukan basis massa membuat PPP kehilangan arah dan daya tarik bagi pemilih muda yang lebih mengutamakan isu-isu sosial dan ekonomi yang lebih praktis daripada isu-isu ideologis semata. (Muhaimin et al., 2024)

PPP juga mengalami permasalahan dalam hal strategi komunikasi politik. Partai ini tidak bisa menjawab tantangan perubahan sosial, terutama dalam mengartikulasikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin plural dan beragam. Dengan pemilih yang semakin rasional dan menginginkan solusi konkret, PPP cenderung terjebak dalam pola kampanye yang terlalu simbolik, tanpa memberikan penawaran program yang jelas dan aplikatif. Hal ini menjadi sebuah kelemahan yang tidak bisa diatasi, meskipun PPP memiliki dukungan dari beberapa tokoh besar dan jaringan sosial yang luas. (Nasuhaidi & Subekti, 2024)

Selain krisis institusional, fragmentasi politik Islam juga berperan penting dalam kegagalan PPP. Fragmentasi ini terlihat dalam ketidakbisaan PPP untuk berkoalisi secara efektif dengan partai-partai Islam lainnya, baik yang moderat seperti PKB dan PKS, maupun yang konservatif. Meskipun dalam beberapa Pemilu sebelumnya PPP berhasil

bergabung dalam koalisi politik Islam yang cukup besar, pada Pemilu 2024, ketegangan dan perbedaan ideologis antara partai-partai Islam semakin terlihat jelas. Fragmentasi ini mengarah pada kurangnya koherensi dalam pendekatan politik dan pada akhirnya membuat PPP terpinggirkan dalam kalkulasi politik nasional. (Qodir, 2023)

Dinamika politik Islam di Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan bahwa partai-partai yang lebih bisa beradaptasi dengan tuntutan demokrasi modern dan memelihara koherensi internal lebih memiliki peluang untuk bertahan. PKB dan PKS berhasil menyesuaikan diri dengan model politik yang lebih terbuka dan pragmatis, sedangkan PPP, yang cenderung mempertahankan struktur yang lebih tradisional dan konservatif, kesulitan bersaing di tengah perubahan tersebut. Fragmentasi dalam politik Islam ini diperburuk oleh semakin terpecahnya suara umat Islam di Indonesia, yang tidak lagi menganggap partai Islam sebagai satu-satunya wadah perjuangan politik mereka. (Ulfa et al., 2024)

Faktor lainnya yang menyebabkan kegagalan PPP adalah kurangnya daya tarik terhadap pemilih muda. Dalam Pemilu 2024, pemilih muda menjadi kelompok yang semakin signifikan, dengan lebih dari 50% dari total pemilih berasal dari generasi Z dan milenial. Kelompok ini lebih cenderung memilih partai yang bisa menawarkan solusi praktis untuk masalah sosial-ekonomi mereka, bukan sekadar ideologi berbasis agama. PPP, dengan pendekatan ideologis yang sangat konservatif, gagal menjangkau kelompok ini. Sementara itu, partai-partai seperti PKB dan PKS, yang meskipun berbasis Islam, lebih fleksibel dalam hal kebijakan dan

lebih responsif terhadap tuntutan perubahan zaman, berhasil menarik minat pemilih muda. PKB, misalnya, menggabungkan nilai-nilai Islam moderat dengan program pembangunan sosial yang lebih inklusif, yang sesuai dengan aspirasi generasi muda yang lebih cenderung pragmatis dan terbuka terhadap nilai-nilai kebangsaan. (Muhaimin et al., 2024)

Untuk dapat bertahan dalam politik Indonesia yang semakin kompetitif dan dinamis, PPP perlu melakukan pembaruan kelembagaan yang menyeluruh. Hal ini mencakup pembaruan struktur organisasi, peningkatan kualitas kepemimpinan, serta penyesuaian strategi kampanye yang lebih relevan dengan tuntutan zaman. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat hubungan dengan basis massa tradisional sambil lebih aktif menyuarakan isu-isu kontemporer yang relevan, seperti ekonomi syariah, pendidikan, dan pemberdayaan sosial. Selain itu, PPP juga harus lebih terbuka terhadap koalisi dengan partai-partai lain yang memiliki visi dan misi yang sejalan, agar dapat mengurangi fragmentasi dalam politik Islam di Indonesia dan memperkuat perannya dalam kancah politik nasional. (Triana, 2024)

4. KESIMPULAN

Pemilu 2024 memperlihatkan dinamika perihal komparasi pertarungan partai politik Islam di Indonesia, yang mencerminkan arah baru dalam konfigurasi politik keagamaan di tengah sistem demokrasi elektoral yang semakin kompleks. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kenyataannya tidak menjamin dominasi elektoral bagi partai-partai Islam. Partai Islam tidak lagi menjadi

pilihan utama hanya karena identitas keagamaannya, melainkan dituntut untuk bisa bersaing dalam ranah kebijakan publik dan kualitas tata kelola partai. Dalam konteks ini, keberhasilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi indikator penting bahwa partai Islam yang bisa membaca perubahan sosial-politik secara cermat, mengedepankan isu-isu sosial-ekonomi yang konkret, serta melakukan konsolidasi internal secara konsisten memiliki peluang lebih besar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah persaingan politik yang ketat.

PKB, misalnya, berhasil memadukan basis tradisional Nahdliyyin dengan pendekatan modern yang menarik bagi pemilih muda dan masyarakat urban. Strategi ini menunjukkan fleksibilitas ideologis yang tidak mengaburkan identitas keislaman, tetapi justru memperkuat legitimasi partai di mata publik yang semakin rasional dan kritis.

Di sisi lain, PKS bisa menjaga konsistensi ideologi Islam moderatnya, sembari terus memperluas segmentasi pemilih melalui isu-isu sosial yang inklusif seperti ekonomi syariah, pendidikan, dan pemberdayaan komunitas. Keberhasilan kedua partai ini mencerminkan bahwa keberlanjutan partai Islam dalam demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kebisaaan mereka dalam membangun narasi politik yang kontekstual, menjawab aspirasi publik secara substantif, serta memperkuat tata kelola partai yang transparan dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan demikian, keberadaan partai Islam di masa depan tidak lagi ditentukan oleh sentimen keagamaan semata, melainkan oleh

relevansi program, kekuatan struktur, dan kebiasaan untuk merespons perubahan sosial yang dinamis.

Sebaliknya, kegagalan PPP dalam menembus ambang batas parlemen menjadi indikasi adanya krisis institusional dan fragmentasi yang signifikan dalam partai tersebut. Krisis kepemimpinan dan kurangnya adaptasi terhadap kebutuhan pemilih yang semakin pragmatis dan beragam menyebabkan PPP kehilangan daya tariknya, meskipun partai ini memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia. Kegagalan PPP juga mencerminkan tantangan yang dihadapi partai-partai Islam secara umum, yang harus bisa mengimbangi perkembangan politik dan sosial yang semakin kompleks dan plural.

Secara keseluruhan, Pemilu 2024 menunjukkan bahwa meskipun partai politik Islam masih memiliki peran penting dalam dinamika politik Indonesia, keberhasilan mereka tidak lagi bisa ditentukan semata-mata oleh klaim identitas keagamaan atau sejarah panjang keberadaan mereka dalam sistem politik nasional.

Dominasi simbol-simbol Islam dan retorika ideologis kini tidak cukup untuk memenangkan hati pemilih yang semakin rasional, kritis, dan berorientasi pada isu. Kemenangan politik kini sangat ditentukan oleh kebiasaan partai dalam membaca perubahan sosial, merespons aspirasi publik secara konkret, serta menunjukkan performa institusional yang profesional dan adaptif. Dalam konteks ini, partai-partai Islam harus bisa melampaui pendekatan konservatif yang stagnan dan mulai membangun narasi baru yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip keadilan sosial,

kesejahteraan rakyat, dan kebangsaan yang inklusif.

Untuk itu, inovasi politik menjadi keharusan, bukan pilihan. Partai politik Islam perlu mereformasi cara kerja internalnya dengan memperkuat kaderisasi, meningkatkan kapasitas manajerial organisasi, serta mengembangkan strategi komunikasi yang berbasis data dan teknologi. Pluralisme dan moderasi harus menjadi fondasi utama agar partai Islam dapat tampil sebagai kekuatan politik yang tidak hanya relevan, tetapi juga bisa menjadi jembatan dialog antar kelompok dalam masyarakat yang majemuk.

Dengan strategi yang visioner dan langkah-langkah yang terukur, partai Islam memiliki peluang besar untuk tidak hanya bertahan, tetapi menjadi aktor strategis dalam pembangunan demokrasi Indonesia ke depan. Keberlanjutan dan keberhasilan mereka dalam pemilu-pemilu mendatang sangat bergantung pada sejauh mana mereka bisa bertransformasi menjadi partai yang responsif, akuntabel, dan kontributif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H. (2023). Partai Politik Islam Di Nusantara. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 2(3), 157. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v2i3.17083>
- Aprimayanti, R. (2025). Kekuatan Partai Politik Islam di Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)). *Bulletin of Asian Islamic Studies*, 2(1), 1–9. <https://attractivejournal.com/index.php/bais/article/view/744>
- Fernando, H., Galuh Larasati, Y., Abdullah, I., Jubba, H., Mugni, A., & Persadha, P. D. (2023). The de-existence of Islamic

- political parties in general elections: A case study of Indonesia as a Muslim-majority country. *Cogent Social Sciences*, 9(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2225838>
- Hamdanny, D. R., & Mukhtar, K. (2021). Wacana Poros Partai Islam untuk PILPRES 2024: Politik Identitas atau Penggalangan Suara Oposisi? *Politea*, 4(2), 190.
<https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.11735>
- Hawari, N., & Agustamsyah, A. (2024). Model Kampanye Partai Islam Konservatif Dalam Perspektif Fiqh Siyasyah Al-Mawardiyy. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 1–20.
<https://doi.org/10.24853/independen.2.1.41-51-66.5>
- Iman, M. S. (2023). Analisis Partai Politik Islam Pra Hingga Pasca Kemerdekaan 1910-1960 : Sebuah Kajian Islam Formalis. *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 3(1), 49–65.
<https://doi.org/10.19109/tanjak.v3i1.18181>
- Muhaimin, R., Fadlillah, S., & Asri, R. (2024). Dinamika Pelembagaan Partai Islam di Pemilu 2024 ; Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa , Partai Keadilan Sejahtera , dan Partai Persatuan Pembangunan. *Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi*, 9(2).
- Nasuhaidi, N., & Subekti, D. (2024). Pola Kekuatan Partai Politik Islam Indonesia Dalam Pemilu Di Era Reformasi. *JISIP-UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu ...)*, 8(1), 82–94.
<https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/35483>
<https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/download/35483/18544>
- Qodir, Z. (2023). Post-Islamism and Legal Reform: The Challenges and Future of Political Islam in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2), 281–306.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.31484>
- Santoso, R., Khairuddin, & Zaelani, A. Q. (2020). Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties in Indonesia. *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, 492(RIICMuSSS 2019), 200–205.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.038>
- Sholehah, U., Margaretha, D. N., Hafidzi, M. I., & Mashudi. (2024). Peran Partai Politik Islam Dalam Kebijakan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3), 90–94.
- Syam, S., Zaleha, & Surono. (2023). DINAMIKA PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PEMBENTUKAN DI KABUPATEN ASAHAN. *Jurnal Reflektika*, 18(2), 200–225.
- Triana, E. D. (2024). EKSISTENSI PARTAI POLITIK ISLAM PADA ERA PEMERINTAHAN JOKOWI MENUJU TAHUN PEMILU 2024 : REGRESI DEMOKRASI DI INDONESIA ? *Jurnal Reflektika*, 19(2), 213–236.
- Ulfa, M., Utami, I. P., & Muhrani, S. (2024). Urgensi dan Peran Partai Politik Dalam Islam Menuju Masyarakat Good citizen. *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14(1).
- Wahidin, D. T. S., Aji, M. P., Ilmar, A., & Juned, M. (2025). Partai islam dan pemilu 2024. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)*, 6(1).